

Menakar Perbedaan Kebijakan Pendidikan Studi Komparatif Antara Indonesia dan Finlandia

Miftahul Husnah^{1*}, Mislaini Mislaini², Intan Lestari³

¹⁻³ UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia

Email : miftahulhusnah1804@gmail.com^{1*}, mislaini101083@gmail.com², intan260604@gmail.com³

Abstract, *In its implementation, previously designed educational programs often do not run as planned. This encourages the emergence of new policies to overcome the problems that arise, with the aim of realizing equitable and quality education as mandated by law. As a developing country, Indonesia is considered to need to study and adopt an education system that has been proven successful in other countries. One of the countries that can be used as an example in this case is Finland. This study uses a meta-analysis method. The results of the study show that there are a number of aspects of education policy in Finland that can be applied in Indonesia. It is hoped that by improving the quality of education, Indonesia will be able to produce a generation that is competent and able to compete at the global level.*

Keywords: *Education Policy, Finland, Education Quality.*

Abstrak, Dalam pelaksanaannya, program-program pendidikan yang dirancang sebelumnya seringkali tidak berjalan sesuai rencana. Hal ini mendorong munculnya kebijakan-kebijakan baru untuk mengatasi permasalahan yang muncul, dengan tujuan mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Sebagai negara berkembang, Indonesia dianggap perlu mempelajari dan mengadopsi sistem pendidikan yang telah terbukti berhasil di negara lain. Salah satu negara yang dapat dijadikan contoh dalam hal ini adalah Finlandia. Penelitian ini menggunakan metode meta-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah aspek dari kebijakan pendidikan di Finlandia yang dapat diterapkan di Indonesia. Diharapkan, dengan meningkatkan mutu pendidikan, Indonesia mampu mencetak generasi yang kompeten dan mampu bersaing di tingkat global.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Finlandia, Mutu Pendidikan.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Setiap negara memiliki kebijakan pendidikan yang dirancang untuk mencerminkan visi, misi, dan kebutuhan masyarakatnya. Dalam konteks ini, membandingkan kebijakan pendidikan di berbagai negara dapat memberikan wawasan mendalam mengenai keberhasilan dan tantangan masing-masing sistem pendidikan. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan populasi besar dan keragaman budaya yang tinggi, menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara merata. Sementara itu, Finlandia dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, yang sering kali menjadi acuan dalam berbagai studi internasional.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi komparatif terhadap kebijakan pendidikan di Indonesia dan Finlandia. Fokus kajian meliputi aspek kurikulum, kesejahteraan guru, sistem evaluasi, hingga strategi pemerataan akses pendidikan. Dengan memahami perbedaan kebijakan antara kedua negara, diharapkan dapat diidentifikasi praktik-praktik terbaik yang relevan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Analisis ini juga berperan penting dalam memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk pengembangan sistem pendidikan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Meta Analisis, yaitu teknik yang menganalisis data dari berbagai hasil penelitian sebelumnya. Meta Analisis dilakukan dengan mengkaji sejumlah penelitian sejenis yang membahas permasalahan yang sama. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik dokumentasi. Populasi penelitian mencakup seluruh dokumen literatur yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan. Dokumen-dokumen yang digunakan meliputi artikel jurnal, buku, dan hasil penelitian lainnya. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yang bertujuan untuk memastikan bahwa data atau informasi yang diperoleh relevan dan sesuai dengan tema penelitian ini.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kebijakan

Kebijakan (policy) secara etimologi (asal kata) diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu "Polis" yang artinya kota (city). Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya (Monahan dalam Syafaruddin, 2008:75).

Kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku (Dunn, 1999). Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (Law) dan Peraturan (Regulation), kebijakan lebih adaptif dan interpretatif, meskipun kebijakan juga mengatur "apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh".

Fungsi Kebijakan

Faktor yang menentukan perubahan, pengembangan, atau restrukturisasi organisasi adalah terlaksananya kebijakan organisasi sehingga dapat dirasakan bahwa kebijakan tersebut benar-benar berfungsi dengan baik. Hakikat kebijakan ialah berupa keputusan yang substansinya adalah tujuan, prinsip dan aturan- aturan. Format kebijakan biasanya dicatat dan dituliskan sebagai pedoman oleh pimpinan, staf, dan personel organisasi, serta interaksinya dengan lingkungan eksternal.

Kebijakan diperoleh melalui suatu proses pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan (policy making) adalah terlihat sebagai sejumlah proses dari semua bagian dan berhubungan kepada sistem sosial dalam membuat sasaran sistem. Proses pembuatan keputusan memperhatikan faktor lingkungan eksternal, input (masukan), proses (transformasi), output (keluaran), dan feedback (umpan balik) dari lingkungan kepada pembuat kebijakan. Berkaitan dengan masalah ini, kebijakan dipandang sebagai: (1) pedoman untuk bertindak, (2) pembatas perilaku, dan (3) bantuan bagi pengambil keputusan (Pongtuluran, 1995:7).

Karakteristik Pendidikan

Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus (Subarsono, 2013), yakni:

Memiliki tujuan pendidikan. Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.

Memenuhi aspek legal-formal. Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas pra-syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. Maka, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut.

Memiliki konsep operasional. Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai.

Dibuat oleh yang berwenang. Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan.

Dapat dievaluasi. Kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. Jika baik, maka Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem juga, oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektifitas, efisiensi dan sustainability yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya. Hal ini harus diperhatikan dengan cermat agar pemberlakuannya kelak tidak menimbulkan kecacatan hukum secara internal. Kemudian, secara eksternal pun kebijakan pendidikan harus bersepadu dengan kebijakan lainnya; kebijakan politik; kebijakan moneter; bahkan kebijakan pendidikan di atasnya atau disamping dan dibawahnya.

Finlandia sebagai suatu negara dinobatkan sebagai negara paling bahagia di dunia oleh World Happiness Report 2020. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu: Dari segi pemerintan yang pro rakyat, Kebebasan masyarakatnya didukung, Tingkat korupsi yang rendah dan rasa saling percaya yang kuat di masyarakat. Tidak hanya itu, dalam bidang Pendidikan Finlandia memiliki sistem Pendidikan yang berkualitas dengan jumlah siswa per kelas yang sedikit yang bertujuan agar membuat suasana belajar menyenangkan dan efektivitas siswa dalam menyerap materi. Negara dengan ibukota Helsinki ini, merupakan pusat desain yang terkenal di dunia dengan keindahan huta yang lebat, terdapat banyak danau, Sungai dan daerah rawa, sehingga dijadikan sebagai sumber inspirasi bagi seni dan sastra Finlandia. Finlandia juga terkenal dengan negara nomor satu pengonsumsi kopi terbanyak di dunia, dan juga salah satu keunikan lainnya yaitu, negara ini memiliki paspor sakti, dimana warga negaranya dapat bebas ke 188 negara.

Kebijakan Pendidikan di Finlandia

Pendidikan merupakan salah satu pilar bagi kesejahteraan masyarakat Finlandia. Finlandia menjadi negara yang memiliki kualitas pendidikan terbaik di dunia. Finlandia memiliki sistem pendidikan yang cukup berbeda dengan negara-negara lain. Keunikan sistem pendidikan Finlandia yaitu tidak adanya ujian bagi para siswa di sekolah. Sebaliknya, sekolah-sekolah di Finlandia lebih fokus mendengarkan keinginan murid dan menganggap mereka sebagai rekan diskusi yang setara.

Tujuan pemerintah memberlakukan sistem ini adalah untuk membuat siswa bisa lebih bahagia dan menghargai potensi diri sendiri. Siswa di Finlandia dinilai berdasarkan kemampuan individu dan kriteria evaluasi yang ditentukan oleh guru mereka sendiri di bawah

pengawasan Kementerian Pendidikan setempat. Tujuan utama pemerintah Finlandia dalam menerapkan sistem ini adalah untuk memastikan bahwa sekolah menjadi tempat yang aman dan setara bagi anak-anak untuk belajar dari lingkungan, untuk menumbuhkan keadilan, keselarasan, dan kebahagiaan sosial bagi peserta didik melalui pembelajaran yang lebih mudah, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendorong anak-anak menikmati materi yang mereka pelajari.

Program yang dikembangkan di Finlandia berfokus pada pembelajaran komprehensif dan tidak berfokus pada pemberian pembelajaran yang terlalu banyak. Bagi mereka, pendidikan bukan hanya berarti mendapat nilai bagus. Mereka ingin lingkungan sekolah menjadi tempat yang adil dan ramah bagi siswa. Karena sistem pendidikannya yang tidak hanya terpusat pada nilai akademik, maka juga tidak ada persaingan yang ketat bagi para siswa selama masa sekolahnya. Para siswa tidak dituntut untuk memiliki peringkat tertinggi di kelas karena tidak ada sistem peringkat kelas. Karena tidak adanya persaingan ini, semua siswa diajarkan untuk lebih mementingkan kerja sama.

Suasana belajar di Finlandia cenderung lebih santai jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Finlandia memberikan perhatian yang besar pada keseimbangan antara waktu belajar di sekolah dan waktu istirahat. Mereka percaya bahwa istirahat yang cukup penting untuk pemulihan dan meningkatkan konsentrasi siswa. Oleh karena itu, jam belajar di Finlandia cenderung lebih pendek dibandingkan dengan negara-negara lain. Selain itu, mereka memberikan nilai penting pada kegiatan di luar kelas dan waktu luang, yang membantu meningkatkan kesejahteraan siswa secara keseluruhan. Siswa-siswi juga memiliki waktu yang cukup untuk makan, melakukan berbagai kegiatan yang menyenangkan, dan bahkan dapat bersantai. Suasana yang sama juga dirasakan oleh para guru. Ruang guru tidak hanya disiapkan untuk keperluan operasional para guru, tetapi juga sebagai fasilitas bagi guru untuk dapat bersantai atau hanya sekadar bersosialisasi dengan guru lainnya.

Sistem pendidikan yang ada di Finlandia menunjukkan bahwa fokus pada kesetaraan, pendidik profesional yang terampil, fleksibilitas dalam kurikulum, pendidikan praktis dan kreatif, serta beban belajar yang seimbang dapat memberikan manfaat besar bagi siswa. Meskipun setiap sistem pendidikan memiliki tantangan dan konteks yang berbeda, kita dapat belajar dari pendekatan Finlandia ini dan menerapkannya dalam lingkungan pendidikan kita sendiri. Prioritaskan pembelajaran yang inklusif, kualitas, dan keseimbangan, serta perhatikan kebutuhan individu setiap siswa, sehingga kita dapat membentuk masa depan yang lebih baik lagi melalui pendidikan. (kumparan.com)

Salah satu faktor yang mendorong keberhasilan Finlandia bertransformasi menjadi negara industri maju dan modern adalah tingginya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya. Tingginya kualitas dan kompetensi SDM Finlandia merupakan hasil dari perjalanan panjang komitmen kuat pemerintah dan rakyat Finlandia dalam membangun dan mengembangkan sistem pendidikan nasionalnya.

Pemerintah dan rakyat Finlandia menyadari bahwa komitmen kuat untuk membangun dan mengembangkan sistem pendidikan nasional merupakan kunci penentu keberhasilan negaranya untuk tetap eksis mempertahankan keberlangsungan hidupnya sebagai negara yang berpenduduk kecil, sumber daya alam yang sangat terbatas dan hidup di tengah kondisi alam yang ekstrim dan kurang bersahabat. Pembangunan negara dan bangsa Finlandia berdiri di atas pilar pendidikan dan penelitian yang berbasis inovasi dan disokong penuh oleh seluruh komponen bangsa. Adapun beberapa kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu :

- a) Pekerjaan Rumah (PR) diberikan sesedikit mungkin. Maksimum hanya menghabiskan waktu setengah jam untuk belajar di rumah.
- b) Guru yang mengajar di SD semuanya harus tamatan S2 dan itupun harus sepuluh besar dari fakultas keguruan.
- c) Di Finlandia guru bebas memilih Rancangan pembelajaran (RPP) dan buku pelajaran yang sesuai dengan pertimbangannya.

Dalam proses pembelajaran hampir semua guru menciptakan metode mengajar yang menyenangkan (*learning is fun*) motivasi intrinsik adalah kata kunci keberhasilan siswa.

Dalam pengaturan kelas di Finlandia tidak ada pengkastaan kelas (kelas khusus atau plus dan kelas biasa, kelas reguler dan non-reguler atau sekolah bilingual). Sekolah swasta mendapat besaran dana yang sama dengan sekolah negeri.

Bahasa Inggris mulai diajarkan di kelas III SD.

Jumlah hari bersekolah di Finlandia hanya 190 hari per tahun (Indonesia 220 hari per tahun. Jumlah hari libur 30 kali lebih banyak dibandingkan dengan Indonesia). Mereka berpandangan semakin banyak hari libur anak semakin pintar, dan selama masa libur tidak boleh ada PR. Hal ini akan membuat libur sekolah tidak menyenangkan. Suasana belajar sangat santai, karena banyak instruksi akan membuat anak tertekan.

Kualifikasi Guru

Standard dan kualifikasi guru pada Sekolah Dasar di Finlandia cukup tinggi dimana guru yang mengajar memiliki pendidikan magister. Karir sebagai guru menjadi karir yang

diminati di Finlandia. Hal ini bertolak belakang dengan Indonesia dimana menjadi guru adalah pilihan terakhir dan kurang diminati. Sehingga seleksi di Perguruan tinggi keguruan belajar di jurusan ilmu pendidikan haruslah pilihan utama atau dapat dikatakan bahwa menjadi guru harus menjadi pilihan pertama bukan pilihan kedua maupun ketiga. Untuk menjadi guru, pelamar institusi ilmu keguruan menjalani seleksi yang ketat. Mereka berkompetensi dengan 1000 pelamar lainnya dan pada akhirnya kuota yang dipilih hanya untuk 30 orang. Tentu saja yang terpilih adalah sumber daya guru yang memiliki kelebihan cerdas berwawasan dan cerdas psikologisnya. Guru-guru di Finlandia terlatih dalam pelaksanaan pembelajaran dan memiliki profesionalisme yang tinggi dalam mengajar. Dengan demikian, semakin meningkat kompetensi yang dimiliki guru dapat membantu peningkatan mutu pendidikan.

Di Finlandia, para guru juga tidak dibebankan dengan segala target dari pemerintah. Bahan ajarnya selalu disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan tiap siswa. Bahkan mereka punya guru khusus yang membimbing anak yang agak tertinggal dalam pelajaran. Fungsi pemerintah di negara ini hanya sebatas dukungan finansial dan legalitas sekolah saja. Sebab, baik sekolah negeri maupun swasta semuanya serba digratiskan. Mungkin ada beberapa sekolah swasta yang membayar, tetapi itu juga masih mendapat subsidi dari pemerintah.

Kurikulum Sekolah Dasar di Finlandia dan Indonesia

Finish National Core Curriculum (Kurikulum Nasional Finlandia/FNCC) tahun 2014 dibagi menjadi dua bagian. Bagian umum berisikan pentingnya kurikulum lokal, proses kurikulum lokal, misi dan tujuan umum pendidikan dasar, dan penilaian. Pada kurikulum Sekolah Dasar ini bagian yang mencakup konten mata pelajaran dibagi berdasarkan kelas (1 dan 2, serta kelas 3-6). Di dalam FNCC, (2014) menjelaskan anak memperoleh kompetensi dalam bidang pengetahuan individu dan kompetensi yang melintasi batas mata pelajaran (kompetensi transversal dan modul pembelajaran multidisiplin).

Prinsip pendidikan di Finlandia membangun kepercayaan (trust). Pendidikan karakter atau soft skill merupakan hal yang utama yang dibangun di sekolah. Indonesia dalam kurikulum pendidikan 2013 juga meletakkan karakter sebagai mata pelajaran dasar yang dalam praktiknya terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya. Dari observasi di Finlandia terlihat bahwa Finlandia sukses dengan pendidikan karakternya terlihat bahwa anak disiplin, kelestarian lingkungan terjaga, mandiri, saling menghargai dan tingkat kejujuran yang tinggi.

Sedangkan di Indonesia, program merdeka belajar merupakan perwujudan dari konsep liberalisasi dalam pendidikan. Merdeka dalam arti memberikan kebebasan dalam berkarya

dan berinovasi dalam pembelajaran. Guru dalam program merdeka belajar memiliki keleluasaan dalam mengarahkan pembelajaran di kelas. Jika dikaji secara prinsipnya, merdeka belajar sama halnya dengan konsep pendidikan di negara maju seperti Finlandia yang mengutamakan kebebasan dalam berkarya dan berinovasi dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Pembelajaran tidak monoton di dalam ruang kelas namun dapat dilakukan dimanapun, ditempat yang bisa menjadi sumber belajar seperti di lahan pertanian, di perpustakaan, di tepi pantai dan di lapangan olahraga. Sistem pendidikan di Finlandia memberikan kebijakan lokal pada prioritas pendidikan seperti kurikulum lokal, alokasi subsidi, ukuran kelas, rekrutmen guru, evaluasi guru dan penjaminan mutu.

Dalam pelaksanaan pendidikan, pihak sekolah di Finlandia melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti: otoritas pemerintah nasional dan lokal, organisasi guru, masyarakat, orang tua, anak dan alumni, lembaga penelitian, dan stake holder yaitu lembaga pemerintahan dan Industri. Sedangkan di Indonesia, kebijakan merdeka belajar merupakan adopsi dari sistem pendidikan negara maju dan konsep ini sejalan dengan sistem pendidikan di Finlandia. Konsep merdeka belajar mendorong pada pengembangan kompetensi dan membangun keterampilan kerja anak dengan kegiatan praktik di industri kerja..

Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Indonesia sebagai negara berkembang dirasa perlu untuk mengadopsi sistem pendidikan yang sudah berhasil diimplementasikan di negara lain. Saat ini, salah satu negara yang dapat dijadikan acuan dibidang pendidikan antara lain Finlandia. Pendidikan di negara Finlandia dikenal termasuk sistem pendidikan terbaik yang ada di dunia. Namun siapa sangka dalam perjalanannya, pendidikan dinegara tersebut masih tergolong rendah pada dewasa di Negara tersebut yang dapat menyelesaikan pendidikannya lebih dari Sembilan (9) tahun di tingkat pendidikan dasar. Pada tahun tersebut hanya beberapa yang mendapatkan gelar sampai pada perguruan tinggi (Sahlberg, 2011).

Landasan yuridis atau kebijakan pendidikan Indonesia adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan. Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan lainnya. Berikut kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan:

Dalam pembukaan (UUD 1945, antara lain: “Atas berkat Rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian

daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa (a) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (b) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (c) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (d) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; serta (e) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Nasional pendidikan menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 yang berisi bahwa Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak. mengarahkan kegiatan dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut.

Salah satu faktor yang mendorong keberhasilan Finlandia bertransformasi menjadi negara industri maju dan modern adalah tingginya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya. Tingginya kualitas dan kompetensi SDM Finlandia merupakan hasil dari perjalanan panjang komitmen kuat pemerintah dan rakyat Finlandia dalam membangun dan mengembangkan sistem pendidikan nasionalnya

Sistem pendidikan dasar di Indonesia dan Finlandia memiliki kesamaan kategori usia anak dan guru diberikan kebebasan untuk berkreaitivitas dan berinovasi dalam mengembangkan pembelajaran. Sedangkan perbedaannya dapat dilihat pada kualifikasi guru, ketersediaan fasilitas, dan kebijakan pemerintah terkait assessment, kesetaraan dan pemerataan mutu pendidikan. Terdapat tiga aspek yang dapat dipelajari dan dikembangkan untuk sistem pendidikan dasar di Indonesia yaitu memfasilitasi kesetaraan dan pemerataan mutu pendidikan di desa dan di kota, menjalankan konsep tripusat pendidikan agar tujuan pendidikan dapat terlaksana dengan maksimal, dan melakukan assesment/evaluasi melalui pelaksanaan ujian sebagai masukan bagi lembaga sekolah dalam meningkatkan pelayanan pendidikan yang tepat dan bermutu. (Muryanti, 2021)

Sistem pendidikan Finlandia menekankan pentingnya kesetaraan dan inklusivitas. Finlandia berusaha memastikan bahwa tidak ada siswa yang tertinggal atau didiskriminasi dalam proses pendidikan. Pendekatan ini berbeda dengan beberapa aspek sistem pendidikan di Indonesia, di mana masih terdapat tantangan dalam memastikan kesetaraan akses dan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Dengan membandingkan sistem pendidikan di Finlandia dan Indonesia secara umum, dapat dilihat bahwa Finlandia memiliki pendekatan yang lebih terstruktur dan fokus pada kesetaraan, sementara Indonesia masih berupaya untuk mengatasi berbagai kendala dalam hal akses dan kualitas pendidikan yang merata di seluruh wilayah.

Dengan demikian, perbandingan ini menunjukkan bahwa Finlandia memiliki pendekatan yang lebih holistik dan berorientasi pada siswa dalam sistem pendidikan

mereka, sementara Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal kesetaraan, kualitas pengajaran, dan infrastruktur pendidikan. Upaya peningkatan sistem pendidikan di Indonesia perlu terus dilakukan dengan belajar dari praktik terbaik yang diterapkan di negara-negara seperti Finlandia/. (Haryanto, 2024).

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Jogjakarta. Gajah Mada University Press.
- Haryanto, B. (2024). Sistem Pendidikan Di Finlandia Sebagai Pelajaran Yang Di Petik (Lesson Learnt) Untuk Pendidikan Indonesia. *Insan Cendekia: Jurnal Studi Islam, Sosial dan Pendidikan*, 3(1), 23-34.
- <https://kumparan.com/ditamuda/negara-finlandia-kualitas-pendidikan-terbaik-nomor-1-di-dunia-21wJ3W4YYFp>
- Muryanti, E., & Herman, Y. (2021). Studi Perbandingan Sistem Pendidikan Dasar di Indonesia dan Finlandia. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 1146-1156.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Pongtiluran, M. S. (1995). Kebijakan publik di Indonesia: Teori dan praktik. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sahlberg, P. 2011. Pendidik Profesional: Pelajaran dari Finlandia. *American Educator*, Musim Panas 2011: 34-38.
- Subarsono. 2013. Analisis Kebijakan Publik. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Syafaruddin. (2008). Manajemen pembelajaran berbasis kompetensi. Jakarta: Ciputat Press. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.